



## Studi Potensi Bisnis dan Pelaku Utama Industri ANGKUTAN LAUT di Indonesia, 2015 – 2019

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah seluas 7,7 juta km dan memiliki garis pantai terpanjang ke empat didunia sepanjang 95.181 km serta memiliki 17.480 pulau. Dengan potensi besar ini, seharusnya Indonesia memiliki peran strategis dalam industri transportasi laut. Namun kenyataannya daya saing angkutan laut Indonesia baik antar pulau maupun antar negara masih rendah, sehingga armada dengan bendera asing masih mendominasi. Disamping itu kondisi pelabuhan Indonesia yang kurang kompetitif membuat lebih dari 60 persen ekspor barang Indonesia harus melalui Singapura.

Melihat kenyataan ini, Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo telah mendesain konsep Tol Laut dengan rencana membangun 24 pelabuhan, baik pelabuhan baru maupun perluasan. Menurut riset CDMI, jumlah pelabuhan saat ini mencapai 1.306, namun hanya 141 pelabuhan yang dapat disinggahi kapal asing, sedangkan pelabuhan yang memenuhi syarat International Ship and Port Facility Security (ISPI) yang menjadi syarat International Maritime Organization (IMO) berjumlah 5 pelabuhan yaitu pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Emas (Semarang), Belawan (Medan) dan Panjang (Lampung), sedangkan 25 pelabuhan lainnya akan menyusul.

Investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan baru dan perluasan pelabuhan di Indonesia mencapai US\$ 7 milyar atau setara Rp. 85 triliun. Pembangunan pelabuhan ini nantinya untuk mendukung proyek Tol Laut dengan investasi fantastis mencapai Rp. 700 triliun, sehingga kapal kapal besar

bisa melayani angkutan barang dari Sabang sampai Jayapura sehingga menurunkan biaya logistik nasional. Beberapa negara seperti Jepang, China dan Amerika Serikat telah berkomitmen untuk membiayai proyek besar ini. Pihak perbankan yang sebelumnya kurang mendukung, kini berlomba lomba akan mengalirkan kreditnya pada industri ini terutama Bank Mandiri, BRI, BNI serta bank swasta lainnya, tidak hanya itu perusahaan asuransi dan lembaga pembiayaan juga semakin gencar melirik industri ini.

Besarnya potensi bisnis angkutan laut di Indonesia membuat PT. CDMI tertarik untuk melakukan riset yang mendalam selama tiga bulan dan akhirnya sukses menerbitkannya dalam sebuah buku yang berjudul "Studi Potensi Bisnis dan Pelaku Utama Industri ANGKUTAN LAUT di Indonesia, 2015 – 2019". Buku studi riset ini membahas tuntas tentang kondisi angkutan laut di Indonesia, pelabuhan dan fasilitasnya serta ekspor dan impor kapal.

Buku studi ini hanya tersedia di PT. CDMI dan dapat dipesan langsung ke bagian marketing dengan ibu Tina melalui telepon (021) 3193 0108, 3193 0109, 3193 0070, atau melalui Fax (021) 3193 0102 atau melalui email : marketing@cdmione.com dengan harga US\$ 650,- untuk edisi Indonesia dan US\$ 700,- untuk edisi Inggris.

Demikian penawaran kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
**P.T. CDMI**

Muslim M. Amin



P.T. CENTRAL DATA MEDIATAMA INDONESIA  
AGP Building, 2<sup>nd</sup> Floor  
Jl. Pegangsaan Timur No. 1 Cikini  
Jakarta 10320, Indonesia

Phone : (021) 31930108 - 9  
Fax : (021) 31930102  
E-mail : [marketing@cdmione.com](mailto:marketing@cdmione.com)  
Website : [www.cdmione.com](http://www.cdmione.com)

Mohon Kirimkan	:	..... eksemplar	<b>"Studi Potensi Bisnis dan Pelaku Utama Industri ANGKUTAN LAUT di Indonesia, 2015 – 2019"</b>		
Nama (Mr/Mrs/Ms)	:		Posisi	:	
Nama Perusahaan	:				
Alamat	:				
Telepon/Fax	:		Tanggal	:	/ /
E-mail	:		Tanda Tangan	:	
Berikan tanda	<input checked="" type="checkbox"/>	Harga:	<input checked="" type="checkbox"/> US\$ 650 (Edisi Indonesia); <input checked="" type="checkbox"/> US\$ 700 (Edisi Inggris)		

Check/Bank Draft    Kirimkan Invoice    Edisi Bhs. Indonesia    Edisi Bhs. Inggris

Catatan : Luar negeri ditambah ongkos kirim

# DAFTAR ISI

❑	<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
❑	<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>1.</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>PETA BISNIS TRANSPORTASI LAUT DI DALAM NEGERI, 2015</b> .....	<b>4</b>
2.1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 .....	4
2.1.1.	Percepatan Pembangunan Kelautan .....	4
2.1.2.	Poros Maritim Dunia .....	9
2.1.3.	Sudah Dimulai .....	11
2.1.4.	Ketertarikan Negara Asing Dengan Tol Laut .....	12
2.2.	Program Pembangunan Strategis Perhubungan Laut Sampai Dengan Tahun 2014. ....	14
2.3.	Rincian Program Pembangunan Strategis Perhubungan Jangka Menengah Perhubungan Laut, 2010-2014 .....	15
<b>3.</b>	<b>ARMADA DAN PRODUKSI ANGKUTAN LAUT</b> .....	<b>17</b>
3.1.	Jumlah Perusahaan Menurut Jenis Pelayaran .....	17
3.2.	Menurut Kepemilikan .....	19
3.3.	Menurut Perusahaan BUMN dan Kapasitasnya .....	21
3.4.	Menurut Provinsi .....	22
3.5.	Kapal Marine Surveyor .....	23
3.6.	Kapal Kenavigasian .....	24
3.7.	Armada Angkutan Laut BUMN .....	25
3.8.	Kapal Patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai .....	26
3.9.	Jumlah Perusahaan Penunjang .....	27
3.10.	Pengembangan Armada Laut Perintis Tahun 2010 – 2014 .....	28
3.11.	Pengembangan Armada Patroli Penjagaan Laut dan Pantai Tahun 2010 – 2014 ...	28
3.12.	Produksi Angkutan Laut .....	29
<b>4.</b>	<b>PROFILE GROUP PERUSAHAAN PELAYARAN NASIONAL</b> .....	<b>30</b>
4.1.	P.T. SAMUDERA INDONESIA Tbk. ....	32
4.2.	P.T. BERLIAN LAJU TANKER Tbk .....	64
4.3.	P.T. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk. ....	77
4.4.	P.T. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk. ....	81
4.5.	P.T. HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk. ....	86

4.6.	P.T. PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk .....	99
4.7.	P.T. WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk .....	102
4.8.	P.T. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk. ....	112
4.9.	PERKAPALAN PERTAMINA.....	121
4.10.	P.T. ANDIKA LINE .....	131
4.11.	P.T. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) (Persero) .....	136
4.12.	P.T. DJAKARTA LLOYD (Persero) .....	144
4.13.	P.T. GESURI LLOYD (Gesuri).....	148
4.14.	"K" Line (Indonesia) .....	154
<b>5.</b>	<b>KONDISI PELABUHAN LAUT DAN FASILITASNYA .....</b>	<b>162</b>
5.1.	Jumlah Pelabuhan Laut.....	163
5.1.1.	Pelabuhan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.....	165
5.1.2.	Pelabuhan Yang Diusahakan Di Seluruh Indonesia .....	166
5.1.3.	Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan di Seluruh Indonesia .....	167
5.1.4.	Perkembangan Pelabuhan/Terminal di Indonesia.....	168
5.1.5.	Hanya 2 Pelabuhan Boleh Disinggahi Kapal Asing .....	168
5.2.	Pelabuhan Laut Utama di Indonesia.....	169
5.2.1.	Sebanyak 25 Pelabuhan Masuk Nominasi Hub .....	173
5.2.2.	Melebihi Kapasitas.....	174
5.2.3.	Penilaian JICA .....	174
5.3.	Rencana Pembangunan Pelabuhan 2015.....	175
5.3.1.	Akan Dibangun 5 Pelabuhan Laut Dalam.....	175
5.3.2.	Pembangunan Pelabuhan Bojonegara .....	176
5.3.4.	Pembangunan Terminal Mobil Jakarta .....	178
5.3.5.	Pembangunan Terminal Kontainer di Teluk Lamong .....	178
5.3.6.	Rencana Pengembangan Terminal Petikemas 2010 – 2014 .....	180
5.4.	Pelabuhan Khusus.....	182
5.4.1.	Pelabuhan Khusus CPO.....	182
5.4.1.1.	Pembangunan Dermaga Khusus CPO di Dumai.....	182
5.4.1.2.	Pembangunan Dermaga Khusus CPO di Teluk Bayur.....	183
5.4.1.3.	Dibutuhkan Dermaga Baru Untuk Pengangkutan Benda Cair .	183
5.4.2.	Pelabuhan Khusus Batubara .....	184
5.4.3.	Perluasan Pelabuhan Khusus Diperlukan .....	184
5.4.4.	Terminal Ferry .....	185
5.4.4.1.	Armada Angkutan Penyeberangan.....	185
5.4.4.2.	Dermaga Penyeberangan .....	187
5.4.4.3.	Produksi Penumpang dan Barang .....	191

5.4.4.4.	Penyeberangan Komersial dan Perintis .....	191
5.4.4.5.	Penyeberangan Komersil .....	192
5.4.4.6.	Penyeberangan Perintis .....	194
5.4.4.7.	Pembangunan Terminal Ferry Margagiri - Ketapang .....	198
5.4.4.8.	Pelabuhan Kapal Pesiar di Bali .....	199
5.4.4.9.	Rp 1 Triliun Untuk ASDP .....	199
5.5.	Arus Kunjungan Kapal dan Bongkar Muat .....	200
5.5.1.	Arus Kunjungan Kapal PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I - IV .....	200
5.5.2.	Arus Bongkar Muat Barang .....	201
5.5.3.	Arus Peti Kemas Pelabuhan .....	201
5.5.4.	Arus Bongkar/Muat Barang Angkutan Antar Pulau di 4 (empat) Pelabuhan Utama .....	202
5.5.5.	Arus Bongkar/Muat Barang Angkutan Luar Negeri di 4 (empat) Pelabuhan Utama .....	203
5.5.6.	Arus Penumpang Pelabuhan yang Dikelola PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I – IV .....	204
5.6.	Peran Serta Pihak Terkait Pelabuhan .....	205
5.6.1.	Peranan BUMN di Bidang Jasa Kepelabuhanan .....	205
5.6.1.1.	Pengelolaan Pelabuhan Oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I - IV .....	205
5.6.1.2.	Fasilitas Pelabuhan Yang Dimiliki Oleh Pelindo .....	207
5.6.1.3.	PT. Pelindo I Tak Perpanjang KSO di Pelabuhan Belawan ...	213
5.6.1.4.	Pelindo IV Didesak Kembangkan Pelabuhan Semayang .....	214
5.6.2.	Peranan Swasta .....	215
5.6.2.1.	Partisipasi Sektor Swasta .....	215
5.6.2.2.	Pelabuhan Internasional Dibuka Untuk Swasta .....	215
5.6.3.	Peranan Pemda .....	216
5.6.3.1.	Pemda Siap Kelola Pelabuhan Regional/Lokal .....	216
5.6.3.2.	Pelabuhan Pengumpulan diserahkan ke Pemda .....	217
5.7.	Rekapitulasi Proyek dan Biaya Yang Dibutuhkan, 2010-2014 .....	217
5.8.	Kebijakan Strategis Dalam Hal Urusan Pelabuhan .....	218
5.8.1.	Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Pelabuhan .....	219
5.8.2.	Izin Baru Pelabuhan Khusus (Pelsus) Diperketat .....	220
5.8.3.	Penerapkan ISPS Terhadap 141 Pelabuhan .....	222
5.9.	Tarif Pelabuhan .....	223
5.9.1.	Aturan Baru Tarif Kapal Laut Untungkan Pelnis .....	224
5.9.2.	Pelayaran Asing Diminta Tekan THC .....	225
5.9.3.	Pemerintah Akan Pungut PPh Atas THC .....	226

<b>6.</b>	<b>KONDISI INDUSTRI PERKAPALAN NASIONAL.....</b>	<b>228</b>
6.1.	Kondisi Galangan Kapal 2015 .....	228
6.1.1.	Galangan Kapal Nasional akan Berkembang .....	232
6.1.2.	Galangan Mulai Fokus Pada Disain Kapal Niaga.....	237
6.1.3.	Saling Melengkapi .....	239
6.1.4.	Galangan Kapal Kesulitan Dana Membiayai Pembangunan Kapal Baru .	240
6.1.5.	Fasilitas.....	242
6.1.6.	Galangan Kapal Orientasi Ekspor Butuh Fasilitas Kawasan Berikat.....	243
6.1.7.	Batam Siap Jadi Marine Cluster .....	245
6.2.	Kapasitas Terpasang Nasional .....	247
6.2.1.	Kapasitas Galangan Kapal Lampau Target.....	247
6.3.	Pemain Utama di Bisnis Transportasi Laut .....	251
6.4.	Perkembangan Produksi Kapal.....	254
6.4.1.	Industri Kapal Nasional Kebanjiran Order.....	255
6.5.	Local Contens .....	257
6.6.	Pengalaman Galangan Kapal Nasional.....	257
6.6.1.	Membangun Kapal Baru .....	257
6.6.2.	Mereparasi Kapal .....	258
6.7.	Perkembangan Ekspor dan Impor Kapal .....	258
6.7.1.	Perkembangan Ekspor .....	258
6.7.2.	Perkembangan Impor.....	261
6.8.	Kebutuhan Kapal .....	266
6.9.	Pengadaan Kapal di Dalam Negeri.....	267
6.10.	Permasalahan Industri Perkapalan dan Industri Pelayaran Nasional .....	269
<b>7.</b>	<b>PELUANG PASAR INDUSTRI KAPAL DI INDONESIA .....</b>	<b>270</b>
7.1.	Strategi Pemasaran.....	270
7.2.	Peluang Pasar Dalam Negeri.....	271
7.3.	Peluang Pasar Luar Negeri .....	272
<b>8.</b>	<b>ROADMAP INDUSTRI PERKAPALAN INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 .....</b>	<b>274</b>
8.1.	Analisa Gap .....	275
8.2.	Industri Inti, Pendukung dan Terkait .....	276
8.3.	Strategi Perusahaan dan Persaingan.....	277
8.4.	Analisa Swot.....	278
8.5.	Sasaran.....	278

8.5.1.	Jangka Menengah (2007 - 2009) .....	278
8.5.2.	Jangka Panjang (2010 - 2025) .....	278
8.5.3.	Sasaran Produksi (Kapal Baru) .....	279
8.5.4.	Sasaran Produksi (Reparasi) .....	279
8.5.5.	Sasaran Ekspor .....	280
8.5.6.	Prioritas Pengembangan Industri Perkapalan.....	280
8.5.7.	Target Kapasitas Fasilitas dan Jenis Produksi .....	281
8.6.	Strategi dan Kebijakan .....	281
8.7.	Program dan Rencana Aksi.....	282
8.8.	Kelembagaan.....	283
8.9.	Harga.....	283
8.9.1.	Harga Komponen Tekan Industri Perkapalan .....	283
<b>9.</b>	<b>KESELAMATAN PELAYARAN .....</b>	<b>285</b>
9.1.	Keselamatan Pelayaran.....	285
9.2.	Rencana Pengembangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran 2010 – 2014 .....	286
9.3.	Kebijakan Strategis Perhubungan Laut Untuk Keamanan .....	286
9.4.	Persyaratan Teknis Dan Keamanan Dalam Transportasi Laut.....	287
9.5.	Peralatan Pendukung Pelayaran.....	288
9.5.1.	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran .....	288
9.5.2.	Stasiun Radio Pantai.....	290
9.5.3.	Jumlah Kapal Kenavigasian .....	292
9.5.4.	Panjang Dermaga Khusus Kenavigasian .....	293
9.5.5.	Taman Pelampung .....	294
9.5.6.	Stasiun Vessel Traffic Services (VTS) .....	295
<b>10.</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INDUSTRI TRANSPORTASI LAUT .....</b>	<b>298</b>
10.1.	Risiko Kecelakaan Kapal/Kecelakaan di Laut dan Gangguan Cuaca .....	298
10.2.	Risiko Kebijakan Pemerintah .....	298
10.3.	Risiko Persaingan Usaha.....	299
10.3.1.	Faktor Daya Saing .....	299
10.3.1.1.	Dunia, Regional dan Domestik .....	299
10.3.1.2.	Perilaku Pasar .....	300
10.3.2.	Faktor Kondisi (Input) .....	301
10.3.2.1.	Sumber Daya Alam .....	301
10.3.2.2.	Sumber Daya Modal .....	301
10.3.2.3.	Sumber Daya Manusia.....	301

10.3.3.	Industri Perkapalan Merupakan Industri Padat Karya .....	302
10.3.3.1.	Infrastruktur .....	302
10.3.4.	Tingkat Persaingan .....	302
10.4.	Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang .....	304
10.5.	Risiko Ketidakstabilan Politik Dalam Negeri .....	305
10.6.	Risiko Perubahan Keadaan Ekonomi .....	305
10.6.1.	Konsorsium Bank Khusus Pelayaran Disiapkan .....	305
10.6.2.	Strategi Pendanaan Kapal Disiapkan .....	306
10.6.3.	Konsorsium Bank Asing Biyai 4 Tanker Milik PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari .....	306
10.7.	Risiko Pemutusan Hubungan Kontrak .....	307
10.8.	Risiko Kegagalan Klaim Asuransi .....	307
10.8.1.	Insentif Asuransi Pelayaran .....	308
10.8.2.	Peluang Bisnis Asuransi Semakin Terbuka .....	308
10.8.3.	Mendongkrak Nilai Premi Asuransi .....	310
10.8.4.	Asuransi Wajib .....	311
10.8.5.	Dampak Inpres No. 5/2005 Tentang Industri Pelayaran Nasional Terhadap Bisnis Asuransi .....	311
10.8.5.1.	Azas Cabotage Tepis Dominasi Pelayaran Asing .....	311
<b>11.</b>	<b>ASPEK PENAWARAN DAN PERMINTAAN .....</b>	<b>315</b>
11.1.	Tingkat Persaingan .....	315
11.2.	Proyeksi Penawaran .....	316
11.2.1.	Angkutan Liquid Cargo Domestik .....	316
11.2.2.	Angkutan Dry Cargo Domestik .....	317
11.2.3.	Angkutan Liquid Cargo Impor dan Ekspor .....	318
11.2.4.	Angkutan Dry Cargo Impor dan Ekspor .....	318
11.3.	Proyeksi Permintaan .....	319
11.3.1.	General Cargo .....	319
11.3.2.	Bulk Cargo .....	320
11.3.3.	Kontainer .....	320
11.3.4.	Liquid Cargo .....	321
<b>12.</b>	<b>PELUANG PERBANKAN DALAM PEMBIAYAAN INDUSTRI PERKAPALAN DI INDONESIA .....</b>	<b>322</b>
12.1.	Skema Pendanaan .....	322
12.1.1.	Pendanaan untuk Capital Expenditure (Capex) .....	323
12.1.2.	Pendanaan untuk Operational Expenditure (Opex) .....	323



12.2.	Prasyarat Kondisi .....	324
12.2.1.	Kepastian Hukum .....	324
12.2.2.	Interest Rate .....	324
12.2.3.	Risk Analysis .....	325
12.2.4.	Business Practice.....	325
12.2.5.	Peran Pemerintah .....	325
12.3.	Dukungan Lembaga Keuangan Nasional Dalam Pemberdayaan Industri Pelayaran	325
12.4.	Kekurangan Dana .....	325
<b>13.</b>	<b>KEPASTIAN BERINVESTASI DI INDUSTRI PERKAPALAN.....</b>	<b>328</b>
13.1.	Pembentukan Maritime Cluster Disambut Antusias.....	328
13.2.	Fasilitas Berikat .....	330
<b>14.</b>	<b>KEBIJAKAN DAN ARAH PENGEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI LAUT.....</b>	<b>331</b>
14.1.	Kebijakan Umum Pembangunan Perhubungan 2010-2014 .....	331
14.1.1.	Program Pembangunan Strategis Perhubungan s.d. Tahun 2014 .....	331
14.1.2.	Revisi UU Bidang Transportasi .....	332
14.1.2.1.	Revisi UU Bidang Transportasi (1).....	332
14.1.2.2.	Revisi UU Bidang Transportasi (2).....	332
14.1.3.	Strategi Pembiayaan Perhubungan Kategori Proyek .....	333
14.1.4.	Pola PPP (Public And Private Partnership), Perpres 67/2005 : .....	333
14.2.	Arah Kebijakan Pemerintah Mengenai Transportasi Laut Secara Umum.....	334
14.2.1.	Penerbitan Inpres No. 5/2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional .....	336
14.2.1.1.	Insentif Pajak.....	336
14.2.1.2.	Menata Kembali Penyelenggaraan Angkutan Laut .....	337
14.2.1.3.	Pemberdayaan Industri Galangan Kapal Nasional.....	337
14.2.2.	Kebijakan Strategis Transportasi Laut.....	339
14.2.2.1.	Kebijakan Strategis Atas Industri Galangan Kapal .....	339
14.2.3.	Kebijakan Mengenai Pendirian Perusahaan Transportasi Laut Dan Keagenan Perusahaan Kapal Asing .....	339
14.2.3.1.	Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Usaha .....	340
14.2.3.2.	Syarat Keagenan Perusahaan Pelayaran Asing.....	342
14.2.4.	Kebijakan Mengenai Tarif Angkutan Laut dan Biaya-Biaya Pelabuhan..	344
14.2.5.	Insentif Asuransi Pelayaran Dikaji.....	346
14.2.6.	Pemerintah Akan Terbitkan 25 Peraturan Pemerintah Tentang Pelayaran	346
14.2.7.	Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2005 Mengenai Pelayaran Nasional .....	348



14.2.8.	Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara BUMN .....	348
14.2.9.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/ 2006 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Industri Dalam Negeri .....	349
14.3.	Kebijakan Pengembangan Industri Perkapalan Nasional .....	349
14.3.1.	Strategi Pengembangan Industri Perkapalan Nasional .....	350
14.3.1.1.	Sasaran Pengembangan .....	350
14.3.1.2.	Program Pokok .....	350
14.3.2.	Implementasi Instruksi Presiden Inpres No. 5 Tahun 2005 Mengenai Pelayaran Nasional .....	352
14.3.3.	Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara BUMN Tentang Pembangunan Kapal, Pemeliharaan dan Reparasi Kapal Pada Industri Perkapalan Nasional .....	353
14.3.4.	Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Industri Dalam Negeri .....	353
14.4.	Hal-Hal Penting Dalam UU No. 17/2008 Tentang Pelayaran .....	354
14.4.1.	Kegagalan Masa Lalu .....	354
14.4.2.	Perubahan Kewenangan Pelindo .....	355
14.4.3.	Peluang Investasi Untuk Investor Asing .....	356
14.4.4.	Kendala Investasi .....	357
14.5.	Maritime Policy Indonesia .....	358
14.5.1.	Substansi Pemberdayaan .....	361
14.5.2.	Perangkap Status-Quo .....	361
14.5.3.	Status Kinerja .....	363
14.5.4.	Cabotage Ronde Dua .....	364
14.5.5.	Komitmen Pemerintah Dipertanyakan .....	364
14.5.6.	Pelanggaran .....	365
14.5.7.	Revisi .....	367
14.5.8.	Kapal Asing AHTS Kuasai Kegiatan Offshore .....	367
14.5.9.	Pembentukan Maritime Cluster Dipercepat .....	368
14.5.10.	Penyeimbang .....	370
14.5.11.	Daya Saing .....	370
14.5.12.	Sasaran Ekspor Industri Perkapalan Hingga 2025 .....	371
14.5.13.	Wajah Pelayaran Nasional Di Era Undang-Undang Pelayaran Baru .....	371
14.6.	Industri Perkapalan Setelah Digulirkan Kebijakan UU No.17/2008 Yang Merevisi Undang-Undang Pelayaran No.21/1992 .....	374
14.7.	Rekapitulasi Proyek dan Biaya Yang Dibutuhkan Oleh Departemen Perhubungan, 2014 .....	375

14.8.	Rekapitulasi Proyek dan Biaya Yang Dibutuhkan Oleh Perhubungan Laut, 2014.	375
14.9.	Lingkungan Strategis Nasional.....	376
14.10.	Lingkungan Strategis Internasional.....	376
<b>15.</b>	<b>KESIMPULAN DAN PROSPEK .....</b>	<b>378</b>
15.1.	Wajah Pelayaran Nasional Di Era Pemerintahan Baru.....	378
15.2.	Undang-Undang Pelayaran Pemerintah Sebelumnya .....	378
15.3.	Dominasi Asing .....	381
15.4.	Ubah Strategi Produksi.....	382
15.5.	Perubahan Kewenangan Pelindo.....	385
15.6.	Siapkan Exit-Strategy bagi Pelindo .....	385
15.7.	Peluang Investasi .....	389
15.8.	Kendala Investasi.....	390

